

BPK Temukan Kerugian Negara Rp11 Miliar

INDIKASI SPPD FIKTIF DI 18 SATKER

PEKANBARU-Meski BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2010, bukan berarti tidak ada indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

HENDRA SAPUTRA

Liputan Pekanbaru

Buktinya, BPK menemukan 27 penyimpangan, di antaranya berupa indikasi kerugian negara sebesar Rp11 miliar

dan pemborosan Rp4,4 miliar.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Riau Muktini, SH, didampingi Kasie IB Indra Syahputra, SE, Ketua Tim Pemeriksa Laporan Keuangan Provinsi Riau tahun 2010 Myrto Handayani, SE, Ak,

MM, Ketua Tim Pemeriksa laporan keuangan Provinsi Riau tahun 2009 Hanif M Taufik SE, AK dan Kasubag Hukum dan Humas Eva Siregar, SH, ketika ditemui, Jumat (8/7) kemarin,



MENGATAKAN indikasi kerugian negara tersebut diantaranya kekosongan kas DPRD Riau sebesar Rp7,4 miliar dan indikasi SPPD fiktif sebesar Rp3,3 miliar pada 18 Satuan Kerja. Di antaranya pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah.

Selain itu, BPK juga menemukan penyimpangan lainnya, yakni adanya kelebihan bayar sebesar Rp37 juta dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp27 juta. Kemudian kekurangan pekerjaan dan denda pada proyek keramba Dinas Perikanan Provinsi yang belum dibayarkan sebesar Rp143 juta. "Terhadap kekurangan kas di DPRD Riau tersebut saat ini ada proses pengembalian sehingga kita akan memantau terus proses

penyetorannya," ujar Muktni.

Sementara mengenai SP-
PD bermasalah sebesar Rp3,3 miliar, menurut Muktni, pihaknya mengindikasikan kegiatan tersebut tidak dilaksanakannya. "Dugaan SPPD fiktif sebesar Rp3,3 miliar ini terdapat di 18 SKPD dari 39 SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi. Dari Rp3,3 miliar tersebut sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian yakni sebesar Rp1,7 miliar hingga laporan hasil audit di keluarkan oleh BPK," ujarnya.

Sementara sekitar Rp1,6 miliar dana SPPD yang diduga fiktif tersebut, menurut Muktni, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada Satker tersebut untuk melengkapi bukti-bukti bahwa perjalanan dinas tersebut benar-benar dilak-

sanakan. "Untuk meyakini seseorang pergi melakukan perjalanan dinas, di antaranya adanya tiket pesawat, *boarding pass* dan lainnya. Namun jika tiket pesawatnya ada, namun *boarding pass*nya tidak ada, maka tidak meyakinkan sehingga kita masih memberi waktu untuk melengkapi bukti-bukti. Jika *boarding pass*nya tidak disimpan, kita minta foto kegiatan yang mereka ikuti dalam perjalanan dinas tersebut," ujar Muktni.

Ketika ditanya keberadaan pemborosan sebesar Rp4,4 miliar, Kepala perwakilan BPK RI Provinsi Riau Muktni mengatakan seluruhnya berada pada Sekretariat Daerah. "Seluruhnya ada di Sekretariat daerah, diantaranya berupa pembayaran SPPD dan honorarium.***